



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP**

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
KECAMATAN MANTUP
TAHUN 2021**

**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mantup Tahun 2021. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantup Tahun 2021 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Mantup dalam 1 tahun kedepan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal. Sehingga diperlukan saran dan masukan dari semua pihak terhadap RENJA Kecamatan Mantup sangat diperlukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Mantup, Agustus 2021

CAMAT MANTUP



SUKRI, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP.196311051986031014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 yang telah berjalan dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan berperan penting dalam setiap kinerja suatu OPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Mantup dilakukan dengan menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Mantup untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan perubahan Rencana Kerja tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang baik Desa maupun Kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan OPD didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga

kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2021 serta lebih optimal kemanfaatannya bagi warga masyarakat;

- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantup Tahun 2021 adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang – Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

16. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2019, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2021 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2018. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantup Tahun 2021 adalah:

1. Memberikan landasan penyusunan KUA dan PPAS tahun 2021 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2021
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2021
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2018 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantup

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang :**
- 1.2. Landasan Hukum :**
- 1.3. Maksud dan Tujuan :**
- 1.4. Sistematika Penulisan :**

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**
- 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**
- 2.4. Review terhadap RKPD**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020

PD Kecamatan Mantup telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2020, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan realisasi renstra PD Kecamatan Mantup yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d 2020

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d thn 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Tahun 2021
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
6.01.01.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.00.01	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa perkantoran	7 Jenis Jasa	7 Jenis Jasa	7 Jenis Jasa	7 Jenis Jasa	100%	7 Jenis Jasa
6.01.01.00.01	02	Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis	7 Jenis Barang Pakai Habis	7 Jenis Barang Pakai Habis	7 Jenis Barang Pakai Habis	7 Jenis Barang Pakai Habis	100%	7 Jenis Barang Pakai Habis
6.01.01.00.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.00.02	03	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5 Jenis Pengadaan	5 Jenis Pengadaan	5 Jenis Pengadaan	5 Jenis Pengadaan	100%	5 Jenis Pengadaan
6.01.01.00.02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Belanja untuk pemeliharaan Gedung kantor	3 Jenis Belanja	3 Jenis Belanja	3 Jenis Belanja	3 Jenis Belanja	100%	3 Jenis Belanja
6.01.01.00.02	06	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung

6.01.01.00.02	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	100%	1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor
6.01.01.00.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.00.03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	35 orang
6.01.01.00.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.00.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	2 orang	2 orang	2 orang	1 orang	50%	2 orang
6.01.01.00.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terselesaikannya Pelaporan Keuangan dan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.00.06	01	Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan	18 jenis Laporan	18 jenis Laporan	18 jenis Laporan	18 jenis Laporan	100%	3 jenis Laporan
6.01.01.00.06	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4 Jenis Laporan	4 Jenis Laporan	4 Jenis Laporan	4 Jenis Laporan	100%	7 Jenis Laporan
6.01.01.00.15		Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.00.15	01	sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana PATEN	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit
6.01.01.00.17		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.01.01.00.17	01	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100%	15 Desa
6.01.01.00.17	02	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Organisasi Kepemudaan	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100%	15 Desa
6.01.01.00.17	03	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Desa yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Trantibum	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100%	15 Desa
6.01.01.00.17	04	Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes	Jumlah Desa yang di Monev APBD Desa dan Perdes	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100%	15 Desa
6.01.01.00.17	05	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100%	15 Desa
6.01.01.00.17	11	Fasilitasi kemiskinan	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan kemiskinan	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100%	15 Desa

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target hasil atau keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan tahun 2020 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%). Kecuali pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Dikarenakan adanya Refocusing anggaran.
2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2020 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa perkantoran	7 Jenis Jasa	7 Jenis Jasa	100%
	2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis	7 Jenis Barang Pakai Habis	7 Jenis Barang Pakai Habis	100%
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5 Jenis Pengadaan	5 Jenis Pengadaan	100%
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Belanja untuk pemeliharaan Gedung kantor	3 Jenis Belanja	3 Jenis Belanja	100%
	3. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab	1 Gedung	1 Gedung	100%
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara	1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda Motor	1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda Motor	100%

1	2	3	4	5	6
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	35 Stel	35 Stel	100%
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	3 orang	0 orang	0 %
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan	2 jenis Laporan	2 jenis Laporan	100%
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	100%
6	Program : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana PATEN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

1	2	3	4	5	6
7	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan	15 Desa	15 Desa	100%
	Kegiatan: 2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Organisasi Kepemudaan	15 Desa	15 Desa	100%
	Kegiatan : 3. Monitoring Dan Evaluasi Apbd Desa Dan Perdes	Jumlah Desa yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Trantibum	15 Desa	15 Desa	100%
	Kegiatan : 4. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Desa yang di Monev APBD Desa dan Perdes	15 Desa	15 Desa	100%
	Kegiatan : 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	100%
	Kegiatan : 6. Fasilitasi Kemiskinan	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan kemiskinan	15 Desa	15 Desa	100%

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

PD Kecamatan Mantup yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Kembangbahu dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Mantup

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		Persentase capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Nilai IKM Layanan Kecamatan	77,70	78,20	78,70	80,20	80,00	80,20	81,50	83,00	
2	Persentase Desa Maju		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Mantup adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Mantup :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Mantup sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Mantup
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Mantup hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
 - d. Perlunya pembinaan kepada penyelenggara kamtibmas dan sosialisasi dengan pihak terkait untuk pengendalian keamanan lingkungan
 - e. Perlunya pembinaan kepada organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya generasi penerus bangsa agar tidak salah arah yang tetap akan dilakukan secara berkesinambungan.
 - f. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Perlunya pembinaan kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan.
 - h. Masih adanya keluarga miskin yang perlu untuk lebih diperhatikan melalui program – program pengentasan kemiskinan sehingga perlu fasilitasi kegiatannya.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (*Soft ware – Hard ware*) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Mantup cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 2 (dua) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat komputer hanya 2 (dua) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan masih kurang maksimal.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan SDM terkait dengan penggunaan alat dan prosedur pelayanan yang baik untuk kepuasan masyarakat;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Mantup terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

a. Program Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2021 akan diadakan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas administrasi perkantoran di setiap urusan agar pelaporan terselesaikan dengan tepat waktu.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2021 perlu adanya pengadaan Sarana dan Prasarana di setiap urusan, pemeliharaan gedung juga pemeliharaan rutin kendaraan dinas guna menunjang dan mempersingkat waktu pekerjaan pegawai di lingkungan kerja.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2021 perlu adanya peningkatan performa pegawai di lingkungan kerja dengan pengadaan pakaian dinas beserta atribut untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang profesional.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2021 perlu adanya peningkatan SDM pegawai di lingkungan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan agar menjadi pegawai yang profesional.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2021 diadakan peningkatan dalam Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja sebagai pemerintahan yang baik.

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Pada tahun 2021 diadakan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dengan melakukan pemenuhan sarana prasarana pelayanan PATEN dan juga pengadaan tenaga administrasi untuk keperluan pelayanan yang baik dan cepat bagi masyarakat.

- g. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Pada tahun 2021 untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan perlu adanya musyawarah kerja yang baik di setiap desa guna mempercepat pembangunan di Desa, serta perlu adanya pembinaan bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan SDM di desa agar sistem administrasi desa berjalan dengan baik, sedangkan untuk bidang kepemudaan perlu diadakan pembinaan dan pelatihan untuk menjadikan generasi pemuda yang berkualitas. Serta pada penyelenggaraan keamanan dan lingkungan terus dilakukan pembinaan kepada ormas maupun organisasi lain demi terciptanya kenyamanan dan ketentraman di wilayah Kecamatan. Untuk program kemiskinan akan dilaksanakan pendataan pada keluarga miskin dengan tujuan pengentasan kemiskinan.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Mantup sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait.

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Kecamatan Mantup

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Prioritas Nasional : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

2. Prioritas Provinsi : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap isu potensi konflik

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

c. Mencegah penyalagunaan obat-obat terlarang dan narkoba

3. Prioritas Kabupaten : Stabilitas Keamanan dan, ketertiban, pengelolaan potensi konflik serta pencegahan tindak kriminal dan mencegah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Deteksi Dini Pemerintah Daerah terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban wilayah

b. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI POLRI

c. Meningkatkan Trantibum dengan penegakan Perda Kabupaten Lamongan
Program /Kegiatan Prioritas Kabupaten :

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

c. Program pemeliharaan Kantrantibmas

d. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik*** dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan publik yang ukuran indikatornya adalah Indeks Kepuasan masyarakat (IKM).

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Mantup menetapkan 2 (dua) tujuan, antara lain :

1. ***Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan*** dengan indikator tujuannya adalah ***Indek Kepuasan Masyarakat***.
2. ***Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik*** dengan indikator tujuannya adalah ***Presentase Desa Maju***.

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Mantup.

Guna mengetahui keberhasilan dari sasaran tersebut perlu adanya indikator yang jelas. Karena terkait pelayanan maka perlunya adanya SOP agar diketahui SPMnya untuk kemudahan dalam melayani masyarakat, dengan indikator lainnya adalah melakukan survey kepada masyarakat selau subyek untuk mengetahui seberapa besar tingkatan kepuasan pelayanan publik di Kecamatan.

2. Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Untuk mengetahui ukuran peningkatan suatu desa dari desa berkembang menjadi desa maju, maka diperlukan penilaian terhadap tertib administrasi pemerintahan desa baik, dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang penilainnya dilakukan oleh Instansi terkait yang dilakukan setiap 1 tahun sekali.

Dalam Renja Perubahan Tahun 2021 tidak ada tujuan dan sasaran yang berubah sehingga tetap sama dengan Renja 2021 .Sebagai gambaran jelas terhadap kesinambungan antara RPJMD Kabupaten Lamongan dan Rencana Strategis PD Kecamatan Mantup dapat dituangkan dalam tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	1. Persentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	B Nilai (80,20)			
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa Maju	2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				2. Persentase Desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
								Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
								Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2021

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD mengacu pada:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
- Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021
- Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan 2021

Berlandaskan pada peraturan dan hasil evaluasi PD sampai dengan semester I tahun 2021, tidak terdapat perubahan program dan kegiatan yang dilakukan sehingga masih tetap sama dengan Renja 2021.

Adapun uraian program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Desa se Kecamatan Mantup.

Berlandaskan pada peraturan dan hasil evaluasi PD sampai dengan semester I tahun 2021, tidak terdapat perubahan program dan kegiatan yang dilakukan sehingga masih tetap sama dengan Renja 2021.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Mantup akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan

sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Juni 2001 Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, program dan kegiatan dalam Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2021 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mantup secara keseluruhan pada tahun 2021 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel matrik di bawah ini:

Tabel Matrik Terlampir

BAB IV **P E N U T U P**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Mantup pada Tahun 2021, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Mantup pada tahun mendatang akan menetapkan 5 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2021.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mantup Tahun 2021 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Mantup tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Mantup, Agustus 2021

CAMAT MANTUP



SUKRI, SH. MM

Pembina Tk I

NIP.196311051986031014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Kabupaten : Lamongan

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH SUB KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Urusan Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	2	2	2	8	8	8	20	20	20	2.512.388.200	2.512.388.200	2.163.401.700	0	0	0	0	0	0	Kec. Mantup
2	Urusan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	65.603.200	65.603.200	25.848.500	0	0	0	0	0	0	
3	Urusan Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	1	1	1	1	1	1	3	3	3	48.000.800	48.000.800	37.860.200	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH		5	5	5	11	11	11	25	25	25	2.625.992.200	2.625.992.200	2.227.110.400	0	0	0	0	0	0	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Kabupaten : Lamongan
Perangkat daerah : Kecamatan Mantup

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	Rp 2.480.833.300	Rp 2.480.833.300	Rp 2.151.662.900
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	100%	100%	100%	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000	Rp 29.902.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 9.912.900
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 9.989.050
		koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 10.000.050
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp 1.716.007.900	Rp 1.716.007.900	Rp 1.539.016.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	Rp 1.676.024.000	Rp 1.676.024.000	Rp 1.520.944.100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 19.878.900	Rp 19.878.900	Rp 8.071.700
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 20.105.000	Rp 20.105.000	Rp 10.000.200
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp -
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	35 Stel	35 Stel	35 Stel	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp -

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp 89.638.200	Rp 89.638.200	Rp 89.638.200
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	Jumlah ATK	46 Jenis	46 Jenis	46 Jenis	Rp 23.886.500	Rp 23.886.500	Rp 23.886.500
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Rp 29.750.000	Rp 29.750.000	Rp 29.750.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah minuman yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah minuman yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Rp 28.001.700	Rp 28.001.700	Rp 28.001.700
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Rp 62.811.200	Rp 62.811.200	Rp 14.530.700
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Item; 5 Jenis	6 Item; 5 Jenis	6 Item; 5 Jenis	Rp 62.811.200	Rp 62.811.200	Rp 14.530.700
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Rp 390.383.000	Rp 390.383.000	Rp 355.383.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	4 Jenis Jasa	4 Jenis Jasa	4 Jenis Jasa	Rp 37.769.000	Rp 37.769.000	Rp 30.769.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis Service	5 Jenis Service	5 Jenis Service	Rp 8.490.000	Rp 8.490.000	Rp 8.490.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang	11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang	11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang	Rp 344.124.000	Rp 344.124.000	Rp 316.124.000

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Rp 131.993.000	Rp 131.993.000	Rp 123.193.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Rp 29.993.000	Rp 29.993.000	Rp 29.993.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Jumlah rehab Gedung Kantor	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Jumlah rehab Gedung Kantor	3 Gedung; 1 Gedung	3 Gedung; 1 Gedung	3 Gedung; 1 Gedung	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 91.200.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	Rp 31.549.900	Rp 31.549.900	Rp 11.738.800
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	Rp 31.549.900	Rp 31.549.900	Rp 11.738.800
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan dan	15 Jenis Pelayanan dan	15 Jenis Pelayanan dan	Rp 31.549.900	Rp 31.549.900	Rp 11.738.800
2	Urusan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	Rp 48.603.200	Rp 48.603.200	Rp 14.352.500
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	Rp 48.603.200	Rp 48.603.200	Rp 14.352.500
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Desa yang Mengikuti Koordina/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Desa yang Mengikuti Koordina/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Desa	15 Desa	15 Desa	Rp 48.603.200	Rp 48.603.200	Rp 14.352.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Rp 11.496.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Rp 11.496.000

No .	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penaganan Konflik sosial yang terselesaikan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penaganan Konflik sosial yang terselesaikan	15 Desa	15 Desa	15 Desa	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Rp 11.496.000

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Urusan Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	Rp 48.000.800	Rp 48.000.800	Rp 37.860.200
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Rp 48.000.800	Rp 48.000.800	Rp 37.860.200
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 12.449.750
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Jumlah Desa yang Difasilitasi	15 Desa	15 Desa	15 Desa	Rp 20.000.800	Rp 20.000.800	Rp 14.647.350
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Desa	15 Desa	15 Desa	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 10.763.100

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
(1)					(2)		(3)				(4)		(5)			(6)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%			Rp 2.480.833.300	Rp 1.986.344.066	Rp (494.489.234)		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	100%	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	100%			Rp 65.000.000	Rp 27.789.500	Rp (37.210.500)		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	8 Dokumen	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 25.000.000	Rp 9.912.900	Rp (15.087.100)	APBD	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 20.000.000	Rp 9.989.050	Rp (10.010.950)	APBD	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	4 Laporan	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 20.000.000	Rp 7.887.550	Rp (12.112.450)	APBD	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			Rp 1.716.007.900	Rp 1.369.738.466	Rp (346.269.434)		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 1.676.024.000	Rp 1.351.894.266	Rp (324.129.734)	APBD	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 19.878.900	Rp 8.000.200	Rp (11.878.700)	APBD	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 20.105.000	Rp 9.844.000	Rp (10.261.000)	APBD	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			Rp 25.000.000	Rp 16.505.900	Rp (8.494.100)		

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	35 Stel	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	35 Stel	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 25.000.000	Rp 16.505.900	Rp (8.494.100)	APBD
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			Rp 89.638.200	Rp 85.843.200	Rp (3.795.000)	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	46 Jenis	Jumlah ATK	46 Jenis	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 23.886.500	Rp 21.424.600	Rp (2.461.900)	APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 29.750.000	Rp 27.416.900	Rp (2.333.100)	APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp -	APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah minuman rapat yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah minuman rapat yang disediakan	5 Jenis	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 28.001.700	Rp 28.001.700	Rp -	APBD
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			Rp 62.811.200	Rp 9.891.000	Rp (52.920.200)	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Item; 5 Jenis	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	6 Item; 5 Jenis	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 62.811.200	Rp 9.891.000	Rp (52.920.200)	APBD
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			Rp 390.383.000	Rp 353.383.000	Rp (37.000.000)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	4 Jenis Jasa	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	4 Jenis Jasa	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 37.769.000	Rp 28.769.000	Rp (9.000.000)	APBD

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Sertvice Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis Service	Jumlah Jasa Sertvice Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis Service	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 8.490.000	Rp 8.490.000	Rp -	APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang dsediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang dsediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 344.124.000	Rp 316.124.000	Rp (28.000.000)	APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%			Rp 131.993.000	Rp 123.193.000	Rp (8.800.000)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -	APBD
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 29.993.000	Rp 29.993.000	Rp -	APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Jumlah rehab Gedung Kantor	3 Gedung; 1 Gedung	Jumlah rehab gedung kantor	3 Gedung; 1 Gedung	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 100.000.000	Rp 91.200.000	Rp (8.800.000)	APBD
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%			Rp 31.549.900	Rp 7.920.500	Rp (23.629.400)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100%	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100%			Rp 31.549.900	Rp 7.920.500	Rp (23.629.400)	

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 31.549.900	Rp 7.920.500	Rp (23.629.400)	APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%			Rp 48.603.200	Rp 8.000.000	Rp (40.603.200)	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%			Rp 48.603.200	Rp 8.000.000	Rp (40.603.200)	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Desa yang Mengikuti Koordina/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Desa	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Desa	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 48.603.200	Rp 8.000.000	Rp (40.603.200)	APBD
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%			Rp 17.000.000	Rp 5.000.000	Rp (12.000.000)	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penanganan Konflik Sosial	100%	Jumlah Penanganan Konflik Sosial	100%			Rp 17.000.000	Rp 5.000.000	Rp (12.000.000)	

7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	15 Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	15 Desa	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 17.000.000	Rp 5.000.000	Rp (12.000.000)	APBD
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%			Rp 48.000.800	Rp 30.317.600	Rp (17.683.200)	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%			Rp 48.000.800	Rp 30.317.600	Rp (17.683.200)	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	15 Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	15 Desa	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 15.000.000	Rp 10.500.000	Rp (4.500.000)	APBD
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	15 Desa	Jumlah Desa yang dilakukan movev terkait Keuangan dan Aset Desa	15 Desa	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 20.000.800	Rp 11.164.000	Rp (8.836.800)	APBD
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Desa	Kec. Mantup	Kec. Mantup	Rp 13.000.000	Rp 8.653.600	Rp (4.346.400)	APBD
J u m l a h												Rp 2.625.987.200	Rp 2.037.582.166	Rp (588.405.034)	